

Analisis Rancangan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Menjadi Rumah Layak Huni (RLH) Studi Kasus: Kegiatan BSPS Tahun 2022 di Kabupaten Batang

Stefanus Konoralma, Rudi Waluyo & Veronika Happy Puspasari
Fakultas Teknik, Universitas Palangka Raya, Kota Palangka Raya
*)konoralmastefanus@gmail.com

Received: 10 Mei 2023, Revised: 19 Juni 2023, Accepted: 20 Juni 2023

Abstract

Poverty is one of the fundamental problems in which individuals or groups lack the ability to meet their basic needs. One of the physical characteristics of the poor is inadequate access to facilities and infrastructure. Inadequate housing is a consequence of poverty, characterized by homes that do not meet safety standards in terms of structural and non-structural components, health aspects, and space adequacy. To improve the welfare of the impoverished, the government has implemented a program to construct decent housing or enhance the quality of uninhabitable houses to make them suitable for living. The 2022 BSPS program aims to enhance the welfare of low-income communities. This article seeks to identify the factors contributing to uninhabitable houses, the role of community self-help, and the necessary materials to improve the quality of such houses. The methodology employed involves surveys, observations, and interviews with prospective beneficiaries. The results indicate that out of 115 respondents, 112 housing units were categorized as uninhabitable, with damages exceeding 60%. The primary causes of uninhabitable houses are the absence of safety components, particularly structural elements, while the remaining damages are attributed to non-structural components. Community self-help initiatives prove sufficient to support assistance in improving uninhabitable houses. The 2022 BSPS program allocates IDR 1,960,000,000 for material needs, with a priority on enhancing the structural components.

Keywords: *Uninhabitable Houses, Habitable Houses, Self-help, BSPS*

Abstrak

Kemiskinan merupakan salah satu masalah mendasar yang mana seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan utama dalam hidupnya. Salah satu dari ciri fisik masyarakat miskin ialah tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Hunian yang tidak layak merupakan salah satu bentuk dari dampak yang disebabkan oleh faktor kemiskinan. Rumah tidak layak huni merupakan rumah yang tidak memenuhi aspek keselamatan yaitu komponen struktur dan komponen non struktur, aspek kesehatan, dan aspek kecukupan ruang. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin pemerintah melaksanakan membuat sebuah program untuk membangun hunian yang layak atau meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni. Program BSPS 2022 yang telah dilaksanakan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab Rumah Tidak Layak Huni, swadaya masyarakat, dan kebutuhan material yang digunakan untuk peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni. Metode yang digunakan merupakan yaitu dengan melakukan survei, observasi, dan wawancara kepada calon penerima bantuan. Hasil menunjukkan 112 unit rumah dari 115 unit rumah responden dengan kategori rumah tidak layak huni dan skala kerusakan $\geq 60\%$. Penyebab RTLH didominasi pada tidak adanya beberapa bagian dari aspek keselamatan berupa komponen struktur dan sisanya kerusakan pada komponen non struktur. Swadaya yang dimiliki masyarakat cukup untuk menunjang bantuan peningkatan RTLH. Dana BSPS 2022 untuk kebutuhan material sebesar Rp 1.960.000.000 dan diprioritaskan untuk peningkatan komponen struktur.

Kata kunci: *Rumah Tidak Layak Huni, Rumah Layak Huni, Swadaya, BSPS.*

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang sering kali menjadi pusat perhatian pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemiskinan adalah kondisi yang mana seseorang ataupun sekelompok orang tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang dimilikinya. (Jayanthakumaran, dkk, 2020).

Salah satu ciri umum kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh dari standar kelayakan. (Romadhan, 2022). Kondisi hunian yang tidak layak adalah salah satu bentuk dari dampak yang diakibatkan oleh faktor kemiskinan dan juga salah satu tolak ukur rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Rumah tidak layak huni dapat menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Rumah adalah salah satu kebutuhan utama manusia yang berbentuk bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuni di dalamnya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah pada dasarnya merupakan wadah bagi manusia atau keluarga dalam melangsungkan hidupnya. (Farida, 2020).

Rumah tidak layak huni yaitu rumah yang tidak memenuhi aspek keselamatan yaitu komponen struktur dan komponen non struktur, aspek kesehatan, dan aspek kecukupan ruang. RTLH adalah rumah yang kurang layak untuk ditempati dikarenakan kondisi dari rumah yang tidak sehat atau berada di kawasan pemukiman kumuh serta membahayakan penghuninya dikarenakan tidak memenuhi aspek keselamatan. (Mardhanie, 2017).

Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Pada pasal 54 ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan memperoleh rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) salah

satunya dapat berupa stimulasi rumah swadaya. Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah masyarakat dengan keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh bantuan rumah. Penerima Bantuan adalah masyarakat yang telah lolos ditahap verifikasi lapangan dari tahap tersebut calon penerima bantuan dinilai dari berbagai aspek. (Mamangkey, 2019).

Dalam pemenuhan Rumah layak Huni (RLH), terdapat beberapa permasalahan dalam perencanaan/perancangannya. Masalah utama dalam penelitian ini yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya RLH, lalu dengan dana yang ada masyarakat dapat meningkatkan kualitas huniannya. Penelitian ini dimulai dari tahap verifikasi calon penerima bantuan untuk mengetahui berapa jumlah RTLH dan apa saja penyebab RTLH, survei toko penyedia bahan bangunan untuk menentukan harga material/bahan bangunan, mengidentifikasi apa saja keswadayaan penerima bantuan, perancangan anggaran biaya.

Penelitian ini dilaksanakan pada kegiatan BSPS yang telah terlaksana di Jawa Tengah, Kabupaten Batang, Kecamatan Bawang, Desa Deles, Desa Sidoharjo dan Desa Kebaturan. Kegiatan verifikasi dilakukan pada CPB untuk penentuan RTLH, selanjutnya identifikasi keswadayaan dan identifikasi kebutuhan material /bahan bangunan dilakukan pada PB.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penyebab RTLH, mengetahui swadaya yang dimiliki oleh penerima bantuan BSPS 2022, serta material apa saja yang dibutuhkan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH). Kiranya penelitian ini dapat menjadi gambaran rancangan dalam peningkatan kualitas RTLH.

Metode

Metode penelitian kualitatif dapat dikatakan sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) disebut juga sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono, 2015).

Teknik pengumpulan data dengan melakukan survei didalamnya berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Responden dalam penelitian ini adalah Calon Penerima Bantuan BSPS 2022 serta yang menjadi objek observasi dalam penelitian ini yaitu hunian yang dimiliki oleh calon penerima bantuan. Pengumpulan data dilakukan di tiga desa

yaitu Desa Deles, Desa Kebaturan, dan Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah dengan waktu pengumpulan data selama empat bulan.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan bantuan *Microsoft Excel* dengan hasil deskriptif dan berupa diagram persentase. Metode yang digunakan dalam analisis data ini yaitu metode *Miles & Huberman* (Sugiyono, 2015), yang terdiri dari: (a) reduksi data, (b) penyajian data, dan (c) kesimpulan

Hasil dan Pembahasan

Dalam penentuan masyarakat yang akan menjadi Penerima Bantuan (PB) ada beberapa penilaian, salah satunya kondisi fisik rumah. Kondisi fisik rumah dinilai berdasarkan standar BSPS yang mengacu pada *Sustainable Development Goals (SDGs)* desa tentang pemukiman yang aman dan nyaman. Dalam *SDGs* kriteria rumah layak huni mencakup:

1. Ketahanan konstruksi
 - Struktur Beton
 - a. Pondasi diharapkan menggunakan swadaya, dikarenakan pondasi sulit diidentifikasi karena posisi tertanam di dalam tanah;
 - b. Sloof dengan dimensi 15 cm x 12 cm
 - c. Kolom dengan dimensi 15 cm x 15 cm, jarak maksimal antar kolom 3 m
 - d. Ring Balok dengan dimensi 15 cm x 12 cm
 - e. Rangka Atap menggunakan Kuda Kuda Kayu

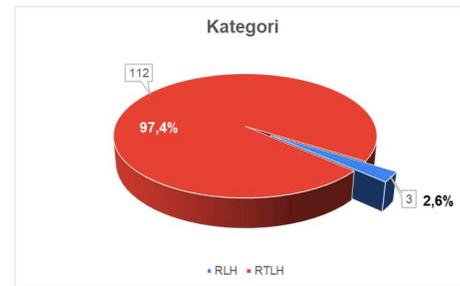
Dengan pembesian diameter tulangan utama 10 mm, tulangan Sengkang 8 mm dengan jarak sengkang 15 cm. Besi full toleransi ketelitian sebesar 0,04 mm.

Non Struktur

- a. Untuk daerah Jawa Tengah minimal menggunakan dinding semi permanen (Sebagian dinding bata dan kombinasi kayu).
 - b. Ketinggian rumah layak huni minimal 2,8 m sedangkan pada rumah kayu memiliki ketinggian maksimal 2,2 m menyesuaikan dengan bentang maksimal kayu sehingga perlu ada perubahan untuk memenuhi kriteria rumah layak huni.
2. Sanitasi
Ketersediaan akses sanitasi yang layak. Misalnya pengadaan MCK, septictank atau resapan pribadi/komunal.
 3. Air Bersih
Ketersediaan untuk akses air minum yang layak untuk diminum
 4. Luas bangunan
Berdasarkan standar SDG's untuk luas bangunan idealnya mampu memberikan kecukupan luas tempat tinggal $\geq 7,2$ m²/orang.

Adapun faktor pendukung untuk rumah layak huni adalah adanya pencahayaan sebesar 10% dan penghawaan 5% dari luas bangunan. Sehingga, sekurang-kurangnya adalah 15% untuk pencahayaan dan penghawaan dari total luas bangunan.

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)



Gambar 1. Diagram Kategori

Kondisi fisik rumah yang telah disurvei langsung selanjutnya dimasukkan ke dalam *data base* untuk ditentukan kategorinya. Dari hasil survei atau verifikasi lapangan didapat sejumlah 115 calon penerima bantuan dengan rincian Desa Deles 13 CPB, Desa Sidoharjo 48 CPB, dan Desa Kebaturan 54 CPB.

Dari hasil survei yang adalah menganalisis kondisi fisik rumah dari beberapa aspek didapati 2 kategori yaitu RTLH sebanyak 112 unit dan RLH 3 unit. Dapat disimpulkan bahwa yang dari hasil survei atau verifikasi lapangan terdapat dua kategori yaitu RLH dan RTLH. Kategori RLH berjumlah 3 unit rumah sedangkan RLTH berjumlah 112 dengan tingkat kerusakan $\geq 60\%$. Selanjutnya untuk kategori RTLH ditetapkan sebagai Penerima Bantuan (PB).

Faktor Penyebab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Berdasarkan panduan pelaksanaan BSPS 2022 rumah tidak layak huni apabila tidak memenuhi:

- 3 struktur
- 2 struktur + 3 non struktur
- 2 struktur + 2 non struktur + Sanitasi
- 2 struktur + 1 non struktur + Sanitasi

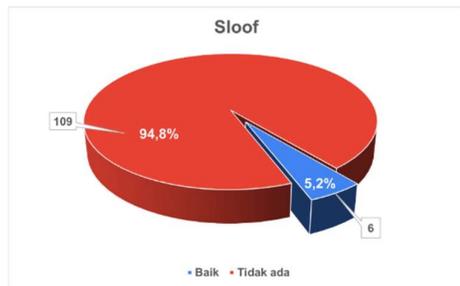
- 2 struktur + 1 non struktur + Sanitasi + Air minum

Dalam penilaian observasi komponen kerusakan dibagi atas dua yaitu, Komponen Struktur dan Komponen Non Struktur.

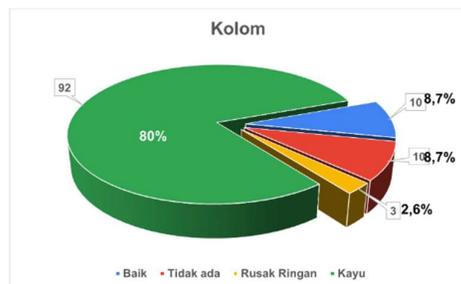


Gambar 2. Diagram Pondasi

Dari hasil verifikasi lapangan rumah yang memiliki pondasi berjumlah 27 unit dengan kondisi baik sejumlah 26 unit rumah atau 22,6% dari keseluruhan, satu unit rumah dengan kondisi rusak sebagian, jenis pondasi yang dimiliki adalah pondasi menerus atau batu kali dan 88 unit rumah belum memiliki pondasi atau 76,5% dari total keseluruhan.

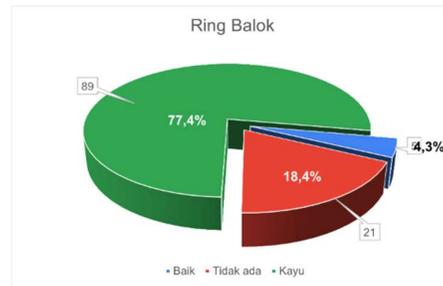


Gambar 3. Diagram Sloof



Gambar 4. Diagram Kolom

Untuk sloof 94,8% unit rumah yang disurvei belum memiliki sloof sedangkan 5,2% (6 unit) sudah memiliki sloof bertulang dengan kondisi baik.



Gambar 5. Diagram Ring Balok

Komponen struktur selanjutnya yaitu kolom, untuk kolom dengan kondisi baik sebanyak 8,7% (sepuluh unit) jenis kolom ini yaitu sudah menggunakan cor beton dengan tulangan didalamnya, 8,7% (sepuluh unit) rumah dengan tidak memiliki kolom, 2,6% (tiga unit) rumah memiliki kolom dengan kondisi rusak ringan, 80% (92 unit) rumah dengan kolom dengan material kayu balok. Pada kasus ini, rumah yang memiliki kolom berbahan kayu balok dapat dikatakan rusak total, sehingga perlu mendapat peningkatan.

Komponen struktur selanjutnya yaitu ring balok, dari hasil survei didapati 4,3% (lima unit) rumah memiliki ring balok dengan kondisi baik, yaitu ring balok material cor beton bertulang, 18,4% (21 unit) rumah belum memiliki ring balok dengan material kayu balok. Sama seperti kolom, untuk rumah yang memiliki ring balok kayu dapat dikatakan rusak berat, sehingga memerlukan penanganan khusus.



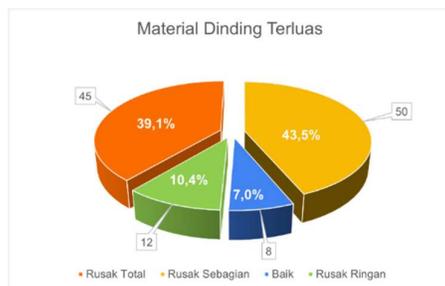
Gambar 6. Diagram Kerangka Atap

Pada diagram menunjukkan bahwa unit rumah yang memiliki kondisi rangka atap baik sejumlah 29,6% (34 unit), sedangkan kondisi rusak ringan 21,7% (25 unit), Rusak Sebagian 47% (54 unit), dan rusak total 1,7% (2 unit).



Gambar 7. Diagram Penutup Atap

Dari hasil survei atau verifikasi lapangan material penutup atap terluas 18,3% (21 unit) rumah memiliki penutup atap dengan kondisi baik. material yang digunakan berupa seng gelombang, 22,6% (26 unit) rumah dengan kondisi rusak ringan, 54,8% (63 unit) rumah dengan kondisi material penutup atap rusak sebagian, 4,3% (5 unit) rumah dengan kondisi material penutup atap rusak total.



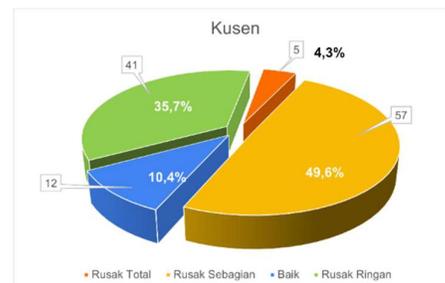
Gambar 8. Diagram Material Dinding Terluas

Hasil survei atau verifikasi lapangan material dinding terluas didapat 7,00% (8 unit) rumah dengan kondisi material dinding terluas baik, material yang digunakan berupa dinding beton, 10,4% (12 unit) rumah dengan kondisi dinding rusak ringan, 39,1% (45 unit) dengan kondisi dinding rusak sebagian, dan 43,5% (50) dengan kondisi dinding rusak total.

Hasil survei atau verifikasi lapangan untuk material lantai terluas menunjukkan beberapa kondisi, 48,7% (56 unit) rumah dengan material lantai plester kondisi baik, 5,2% (6 unit) rumah dengan lantai plester kondisi rusak ringan, 0,9 % (1 unit) rumah dengan lantai plester kondisi rusak sebagian, 41,7 % (48 unit) dengan lantai rumah masih tanah pada kondisi ini dapat dikatakan rusak total.



Gambar 1. Material Lantai Terluas



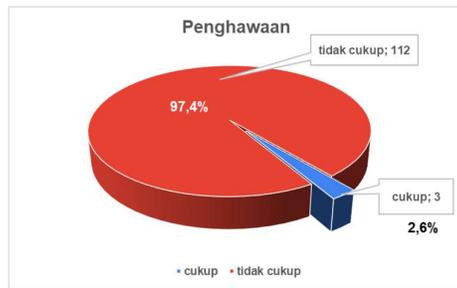
Gambar 10. Diagram Persentase Kusen

Untuk menunjang penghawaan dan dan pencahayaan suatu hunian diperlukan jendela dan pintu sebagai akses masuk ke dalam hunian/rumah. Pada diagram menunjukkan 10,4% (12 unit rumah) memiliki kusen pintu dan jendela dengan kondisi baik, 35,7% (41 unit) rumah dengan kusen pintu dan jendela dengan kondisi rusak ringan, 49,6% (57 unit) rumah memiliki kusen pintu dan jendela dengan kondisi rusak sebagian, dan 4,3% (5 unit) rumah memiliki kusen pintu dan jendela dengan kondisi rusak total.



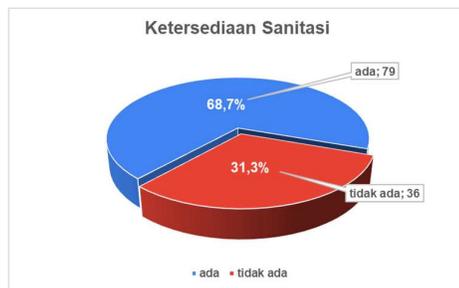
Gambar 11. Diagram Pencahayaan

Pada Gambar 11 dan 12 menunjukkan hasil survei kondisi fisik rumah yang mana pencahayaan dan penghawaan 97,4% belum terpenuhi atau belum mencukupi dengan standar yang ditetapkan yaitu 5% luas lantai per m² untuk penghawaan dan 10% dari luas lantai per m² untuk pencahayaan.



Gambar 12. Diagram Pengkayaan

Diagram 13 menunjukkan persentase serta jumlah hunian rumah yang sudah tersedia sanitasi berupa MCK dan sudah sesuai dengan standar. Ketersediaan sanitasi dari keseluruhan 68,7% (79 unit rumah) sudah tersedia sedangkan 31,3% (36 unit rumah) belum memiliki MCK baik individu maupun komunal.



Gambar 13. Ketersediaan Sanitasi

Diagram 14 ditujukan untuk ketersediaan sumber/akses air minum pada diagram menunjukkan bahwa seluruh unit rumah sudah memiliki atau terakses dengan sumber air minum atau air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.



Gambar 14. Ketersediaan Akses Air Minum



Gambar 15. Diagram Identifikasi Keswadayaan

Diagram 15 menunjukkan hasil identifikasi keswadayaan atau swadaya yang dimiliki oleh penerima bantuan. Dari 1 dari 112 penerima bantuan tidak memiliki swadaya dalam bentuk apapun. Bentuk swadaya yang dimiliki oleh penerima bantuan berupa 101 PB menggunakan material lama (Kusen Pintu, Kusen Jendela, Kayu Rangka Atap, Seng, dsb), 85 PB Memiliki Bahan Bangunan (Batu Kali, Pasir, Batu Pecah), 45 PB menggunakan Uang Tabungan yang , dan 2 PB lainnya memiliki hewan ternak yang akan diuangkan. Swadaya yang dimiliki oleh penerima bantuan dapat dikatakan cukup untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni, pada masing-masing rumah penerima bantuan. Jumlah swadaya yang dimiliki oleh seluruh penerima bantuan sebesar Rp 1.053.139.625,-.

Berdasarkan biaya yang ditetapkan untuk material atau bahan bangunan BSPS maka total biaya yang digunakan untuk peningkatan kualitas rumah layak huni sebesar Rp 1.960.000.000,-. Pada tabel menunjukkan penggunaan material lebih difokuskan untuk peningkatan struktur utama bangunan rumah berupa sloof, kolom, dan ring balok. Pada bagian non struktur berupa peningkatan material dinding dan material lantai.

Kesimpulan

Dari hasil survei kondisi fisik rumah dan wawancara bersama calon penerima bantuan, maka dapat disimpulkan bahwa:

Penyebab kondisi rumah tidak layak huni yaitu terbagi atas komponen struktur dan komponen nonstruktur. Untuk komponen struktur yaitu 1) Pondasi dari seluruh unit 88 unit rumah tidak memiliki pondasi, satu unit memiliki pondasi dengan kondisi rusak sebagian dan sisanya 26 unit rumah memiliki pondasi menerus dengan kondisi baik; 2) Sloof, dari seluruh unit yang disurvei 109 tidak memiliki sloof; 3) Kolom, dari hasil analisis 10 unit rumah tidak memiliki kolom dan sisanya memiliki kolom, tiga unit rumah memiliki kolom

dengan kondisi rusak ringan, 92 unit rumah dengan material kayu balok; 4) Ring balok, dari hasil analisis 89 unit rumah memiliki ring balok dengan material kayu balok dan 21 unit rumah tidak memiliki ring balok; 5) Kerangka Atap, pada bagian ini seluruh unit rumah telah memiliki rangka atap namun kondisi rangka atap 25 unit rumah rusak ringan, 54 unit rumah rusak sebagian, dua unit rumah rusak total. Komponen nonstruktur berupa material terluas bangunan. 1) Penutup atap dengan kondisi 26 unit rusak ringan, 63 rusak sebagian, lima unit rusak total; 2) Material Dinding Terlulus dengan kondisi 12 unit rusak ringan, 50 unit rusak sebagian, dan 45 unit rusak total; 3) Material lantai terluas dengan kondisi enam unit rusak ringan, satu unit rusak sebagian, 4 unit rusak total, 48 unit rumah lantai tanah, 56 unit rumah lantai plester. 4) Kusén, dengan kondisi 41 unit rumah rusak ringan, 57 unit rumah rusak sebagian, lima unit rumah rusak total. Maka dari itu 112 unit rumah ditetapkan dengan kategori kondisi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Faktor lain penyebab RTLH yaitu pencahayaan dan penghawaan serta Prasarana dan Sarana Umum (PSU). Dari seluruh unit rumah yang ditetapkan sebagai RTLH, seluruhnya belum mendapatkan pencahayaan dan penghawaan yang cukup atau kurang dari 15% luas bangunan. Ketersediaan sanitasi hanya sebesar 68,7% atau 79 unit rumah, 36 unit rumah belum memiliki akses sanitasi. Namun seluruh unit rumah telah tersedia akses air minum atau air bersih.

Hasil dari identifikasi keswadayaan yang dimiliki penerima bantuan berupa Material Lama, Bahan Bangunan yang belum terpakai, Uang/Tabungan serta lainnya berupa hewan ternak. Pada realisasinya jumlah swadaya yang dimiliki cukup sebagai tambahan untuk meningkatkan kualitas rumah layak huni. Apabila diuangkan jumlah swadaya yang dimiliki seluruh penerima bantuan berjumlah Rp 1.053.139.625,-

Penggunaan dana material BSPS untuk kebutuhan peningkatan rumah layak huni sebesar Rp 17.500.000,- sehingga total biaya yang digunakan yaitu sebesar Rp 1.960.000.000,-. Dari hasil analisis kebutuhan, dana tersebut difokuskan pada peningkatan komponen struktur yaitu pembelian material untuk pekerjaan sloof, pekerjaan kolom, pekerjaan ring balok, serta material dinding dan material lantai.

Saran

Penelitian lanjutan bisa memanfaatkan data serupa untuk membuat rancangan berdasarkan kategori kerusakan untuk penanganan peningkatan kualitas

RTLH, juga dapat melakukan perbandingan analisis yang digunakan dalam rancangan kegiatan BSPS.

Dalam pelaksanaannya peningkatan kualitas, luas rancangan/rencana usulan dapat menyesuaikan dengan luas kondisi awal atau dapat disesuaikan dengan jumlah penghuni berdasarkan luasan yang telah ditetapkan untuk Rumah Layak Huni (RLH) agar penggunaan dana digunakan secara maksimal dalam peningkatan RTLH.

Pada rencana usulan peningkatan RTLH tidak mengubah tampak rumah yang menjadi ciri khas dari permukiman disuatu desa, sehingga desa yang mendapat bantuan BSPS dapat menjadi desa wisata yang menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung serta menunjang ekonomi masyarakat desa tersebut dan mengurangi angka kemiskinan ekstrim yang terjadi disuatu desa.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Mitra Direktorat Jendral Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang telah memberikan ruang untuk menjadi bagian di dalamnya.

Daftar Pustaka

- Arsyad, Lincoln, & Soeratno, 1988. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UPPAMP YKPN.
- Apriliae, G., 2022. *Penentuan Prioritas Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dengan Menggunakan Microsoft House Priority Application (MHPA)*. Tugas Akhir. Palangka Raya: UPR.
- Creswell, J., 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and mixed methods approaches 4th ed*. California: SAGE Publications
- DF, D. W., Theressia, M., & Mulyadi., 2021, April. *Analisa persepsi program BSPS Nagari Bungo Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan*. Jurnal Lingkungan, 36.
- Direktorat Jendral Perumahan Departemen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat., 2021. *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya*. In *Edaran Direktorat Jendral No.3/SE/Dr/2021*. Jakarta Selatan.
- Direktorat Jendral Perumahan Departemen Perusahaan Umum dan Perumahan Rakyat.,

2021. *Panduan Teknis 2: Persiapan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)*. Jakarta: Direktorat Rumah Swadaya.
- Departemen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022. Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus. *No.7/PRT/M/2022*. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Farida, Ida., 2020. Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Subang. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*. Vol. 7. No.1.
- Gulo, W., 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hardiyana B., 2019. Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Rumah Tidak Layak Huni Sebagai Pendukung Keputusan Kebijakan di Tingkat Desa. *JUTISI: Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*. Vol. 5. No.1.
- Jayanthakumaran, K., dkk. 2020. Correction to: Internal Migration, Urbanization, and Poverty in Asia: Dynamics and Interrelationships. *In Internal Migration, Urbanization, and Poverty in Asia: Dynamics and Interrelationships*. [Online] available at: https://doi.org/10.1007/978-981-13-1537-4_13
- Junidar, 2021. Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada Kelurahan Tanjung Unggat. *Jisipol: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji STISPOL Raja Haji Tanjungpinang*. Vol. 2. No.2.
- Kamil, M., 2022. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Tabalong: Sebuah Evaluasi. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 4. No.1.
- Kania, I., 2021. Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Garut. *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*. Vol. 5. No. 2.
- Kawalo, Ziko., 2022. Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk Membantu Menyediakan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin di Desa Mogoyunggu Kecamatan Dumoga Timur. *Jurnal Governance*. Vol. 2. No. 2.
- Mamangkey, A., Lumolos, J., & Pangemanan, F., 2019. Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. Vol. 1. No. 3
- Mardhanie, B. A., 2018. Penelitian Rumah Tidak layak Huni (RTLH) Kabupaten Bulungan Tahun 2017: (Jumlah dan Prioritas Penanganan). *Jurnal Kreatif: Desain Produk Industri dan Arsitektur*. Vol. 5. No.2.
- Mulyadi, 2021. Analisa Persepsi Penerima Program BSPS Nagari Bungo Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. *Zona: Jurnal Lingkungan*. Vol. 5. No.1.
- Putri, M. E., 2012. *Analisis Kebutuhan Rumah Layak Huni di Kelurahan Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu*. Tugas Akhir. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Ratnasari, A., & Dkk., 2019. *Penerapan Konsep Rumah Sehat Sederhana pada Bedah Rumah Warga di Desa Pakulonon Barat Tangerang, Tangerang*. Tangerang: Studi Teknik Sipil, Institut Sains dan Teknologi Pradita.
- Republik Indonesia., 2011. *Undang-undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan Kawasan dan Permukiman*. Jakarta: Pemerintah Pusat.
- Rizky, D., 2022. Analisis Prioritas Pengendalian Risiko Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Sumatera Utara. *Juitech*. Vol. 6. No.1.
- Sugiyono., 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Salim, & Syahrums., 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- Triandini, A., 2019. *Konsep Dan Penerapan Waste Management Pada Kontraktor Di Kota Palangka Raya*. *Jurnal Teknik*, 90.
- Waluyo, R. & dkk., 2021. *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Palangka Raya: Jurusan/Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Palangka Raya.